

## **IPTEKS BALANCE SCORECARD DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI SULAWESI UTARA**

Evilyn Mega Anjali Suenang<sup>1</sup>, Jessy D. L. Warongan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Unsrat, Manado, 95115, Indonesia

Email : evilynsuenang07@gmail.com

### **ABSTRACT**

*Performance is the achievement or level of success of a person or group of people who have exceeded the standard set. The higher the achievement of the work the better it will be and vice versa. To find out the achievement, it is necessary to measure performance. In the scope of the public sector where performance measurement is very important because performance measurement can help to determine the level of achievement of the success of activities or work program from an agency both within the scope of the region to the center. For the reason, in knowing the level of performance it is necessary to measure performance. Performance measurement in this study uses a balanced scorecard concept, where the performance measurement is assessed based on four perspectives. Where from these four perspectives will be seen the performance achieved by the Office of Communication, Information, Coding and Statistics of North Sulawesi Province. Through the four perspectives of the balance scorecard it will be known in any scope the performance of the Regional Office of Communication, Information, Coding and Statistics of North Sulawesi Province still needs to be improved.*

*Keywords : Performance, Performance Measurement, Balance Scorecard*

### **1. PENDAHULUAN**

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang selanjutnya disingkat DKIPSD merupakan instansi yang mempunyai program kegiatan pada lingkup teknologi informatika untuk itu DKIPSD dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel dalam bidang komunikasi dan sistem informasi. Melalui program kegiatan yang telah atau akan dilaksanakan dalam bidang teknologi dan informasi maka diharapkan masyarakat lebih mampu atau cekatan dalam memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan atau mengembangkan pengetahuan, wawasan dan taraf hidup mereka, sedangkan dalam jajaran pemerintah teknologi informasi dapat mengimplementasikan e-government secara utuh, dan dari keberhasilan terlaksananya program kegiatan maka itu akan menjadi salah satu aspek yang akan diukur kinerjanya. Kinerja merupakan hasil atau pencapaian dari seseorang atau sekelompok orang atas pekerjaan yang telah direncanakan dan ditetapkan dari awal melalui strategi yang diterapkan.

Walaupun keberhasilan dalam aspek tersebut namun dalam aspek kinerja pegawai pada DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara masih rendah karena, masih ada beberapa pegawai yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya masing-masing baik itu dari pegawai tetap maupun honorer. Masih kurangnya tanggung jawab akan pekerjaan dari beberapa pegawai sehingga membuat DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara belum efektif sehingga harus ditingkatkan. Dan untuk mengukur kinerja dari DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara maka digunakan alat ukur kinerja melalui *Balance Scorecard*, melalui pengukuran ini DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara akan mengetahui pada aspek apa saja yang harus diperbaiki, dikembangkan dan ditingkatkan lagi. Karena dalam konsep balance scorecard

---

penilaian kinerja bukan hanya dalam lingkup keuangan saja namun lingkup secara keseluruhan organisasi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

**Balance Scorecard.** Balance Scorecard (BSC) adalah sistem manajemen yang mampu menerjemahkan visi dan strategi organisasi ke dalam tindakan nyata di lapangan (Wildilestari 2011:87). Menurut Kaplan dan Norton (2000) *Balance Scorecard (BSC)* merupakan suatu sistem manajemen dalam menerapkan strategi, dan mengukur kinerja yang mengukur kinerja atas aktivitas organisasi tidak hanya melalui sisi finansial saja namun juga pada aspek non finansial serta untuk mengkomunikasikan visi, strategi, dan kinerja yang diharapkan. Empat perspektif Balance Scorecard menurut Kaplan dan Norton yaitu : Perspektif Proses Bisnis Internal, Perspektif Keuangan, Perspektif Pelanggan, dan Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan. Sedangkan menurut Mulyadi (2001:1 ) Balance Scorecard merupakan konsep pengukuran kinerja yang mampu memberikan gambaran mengenai informasi yang akan datang melalui pengukuran sesuai dengan kejadian yang nyata atau bersifat fakta. Balance Scorecard merupakan sarana pengukuran kinerja pegawai, dimana pengukuran kinerjanya dilihat dari seluruh aspek dalam suatu organisasi, tidak melihat hanya dari keuangan saja namu dari proses yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan kerja dalam lingkup organisasi.

**Kinerja.** Kinerja adalah suatu hal yang sangat diperlukan dan harus diperhatikan dalam organisasi, karena kinerja merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari titik awal rencana dibuat, dimana melalui pekerjaan seseorang atau sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan dalam lingkup organisasi, melalui prestasi dan kreatifitas, serta kedisiplinan dalam bekerja maka kinerja tersebut akan mampu mencapai tujuan yang telah ditargetkan. Dalam pencapaian tujuan ini pasti ada indikator-indikator yang akan mempengaruhi kinerja tersebut diantaranya seperti; kemampuan dalam bekerja, lingkungan kerja, dorongan atau motivasi dari rekan kerja dan lain-lain sebagainya.

## 3. METODE DAN TEKNIK PENERAPAN IPTEKS

### 3.1. Metode Penerapan Ipteks

Metode penerapan ipteks yang dipakai dalam pengukuran kinerja adalah analisis balance scorecard menurut Robert S. Kaplan dan David P. Norton yang telah merumuskan konsep balance scorecard.

### 3.2. Teknik Penerapan Ipteks

Untuk teknik penerapan ipteks yang dipakai adalah konsep balance scorecard untuk pengukuran kinerjanya diukur berdasarkan empat perspektif yaitu : perspektif proses bisnis internal, perspektif keuangan, perspektif pelanggan, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1. Gambaran Objek Penerapan Ipteks

Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik daerah provinsi Sulawesi utara. Dimana sebelum DKIPSD terbentuk, dulunya DKIPSD merger dengan Dinas Perhubungan namun setelah terjadi perombakan dimana setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka terjadi perombakan nomenklatur, dimana ada SKPD dilebur, SKPD yang baru terbentuk, bahkan tereliminasi.

Sehingga pada awal tahun 2017 DKIPSD terbentuk, dan juga merupakan salah satu SKPD tipe B. DKIPSD dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan.

#### 4.2. Pembahasan

Untuk mengukur dan menilai kinerja di Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah (DKIPSD) Provinsi Sulawesi Utara menggunakan konsep balance scorecard dengan empat perspektif berikut :

1. *Perspektif Proses Bisnis Internal*. Dalam perspektif proses bisnis internal pengukuran kinerja dilihat berdasarkan aktivitas yang terjadi di dalam instansi yang dimana diukur berdasarkan dua indikator yang sangat penting di DKIPSD yaitu sebagai berikut :
  - **Indikator Sarana dan Prasarana**. Sarana dan Prasarana di DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara sangat baik, dimana untuk sarana dan prasarana yang tersedia dapat digunakan dengan baik. Tempat parkir untuk kendaraan pegawai DKIPSD juga sangat luas, jadi seluruh pegawai DKIPSD dapat memarkir kendaraan karena telah disediakan. Untuk kebersihan kantor juga sangat baik karena kebersihan kantor sudah terjaga karena telah ada petugas kebersihan untuk membersihkan kantor. Akses jaringan di DKIPSD juga sangat baik, pada setiap bidang disediakan satu akses jaringan yang juga memadai sehingga tidak mempersulit pegawai saat bekerja.
  - **Indikator Teknologi dan Sistem Informatika**. Untuk dukungan teknologi dan sistem informatika merupakan indikator yang sangat penting karena mengingat bidang kerja DKIPSD yaitu pada pengembangan teknologi dan sistem informatika, sehingga membuat DKIPSD harus mempercepat kinerjanya dan mengikuti perkembangan jaman. Untuk itulah DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara telah mengembangkan satu program yaitu pembangunan *Command Center* yang nantinya akan menjadi pusat seluruh informasi mulai dari informasi keuangan, penduduk, sosial dan lain-lain. Program ini sementara dikembangkan oleh bidang e-gov yang juga mempunyai teknologi yang mendukung untuk menghubungkan seluruh DKIPSD yang ada di Indonesia dengan Kementerian Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik ketika melakukan konferensi bersama. Pada indikator ini DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara sudah sangat baik karena di era perkembangan jaman DKIPSD mampu mengembangkan dan membuat inovasi yang baru.
2. *Perspektif Keuangan*
  - **Efektifitas Anggaran**. Untuk efektifitas anggaran dapat dilihat dari penyerapan anggaran DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara, yang masih kurang baik. Penyerapan anggaran sampai bulan September 2018 kurang lebih dari 40% ini berarti bahwa penyerapan anggaran masih tidak efektif, dan juga karena perubahan anggaran pada bulan September yang telah diresmikan di DPRD Sulawesi Utara pada bulan September yang telah diresmikan di DPRD Sulawesi Utara pada bulan oktober 2018 maka anggaran DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara bertambah.

**Tabel 1. Laporan Realisasi Keuangan DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara sampai dengan 21 November 2018**

Uraian / PPTK	Anggaran Perubahan (Rp.)	Anggaran Realisasi (Rp.)	%	Sisa Anggaran (Rp.)
Belanja	23.565.701.338	9.623.468.250	40,84%	13.942.233.088
Belanja Tidak Langsung	6.411.149.000	5.397.488.932	84,19%	1.013.660.068
Belanja Langsung	17.154.552.338	4.225.979.318	24,63%	12.928.573.020
Umum & Kepegawaian	3.253.565.668	1.079.918.174	33,19%	2.173.647.494
Keuangan	329.560.670	236.909.113	71,89%	92.651.557
Infokom	1.117.030.000	225.315.837	20,17%	891.714.163
KIP	1.209.146.000	807.405.205	66,77%	401.740.795
E-Gov	10.964.100.000	1.739.389.452	15,86%	9.224.710.548
Persandian	281.150.000	137.041.537	48,74%	144.108.463
<b>JUMLAH</b>	<b>17.154.552.338</b>	<b>4.225.979.318</b>	<b>24,63%</b>	<b>12.928.573.020</b>

Sumber : Data SIMDA Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Melalui data laporan realisasi anggaran perubahan pada tabel 1 bahwa jumlah realisasi anggaran dan persentase realisasi anggaran sangat kecil, ini dikarenakan perubahan anggaran tahun 2018 yang diresmikan pada bulan oktober sehingga untuk realisasi anggaran masih kurang, namun berdasarkan informasi salah satu pegawai di bagian umum dan kepegawaian bahwa untuk bagian umum dan kepegawaian masih ada SPJ dalam proses yaitu pengadaan kendaraan dinas, rehab gedung KIP, dan rumah dinas, dan bisa dilihat pada bidang e-gov yang paling besar anggarannya ini karena bidang e-gov yang melaksanakan program kegiatan pembangunan command center yang nantinya akan menjadi pusat control dari seluruh informasi publik dan untuk sisa anggaran diproses sampai akhir bulan ini sehingga anggaran pada e-gov akan segera habis. Dan DKIPSD akan mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan sebelum akhir tahun 2018 ini.

- **Transparansi Anggaran.** Dalam mempertimbangkan terwujudnya alur informasi secara berjenjang dari kabupaten/kota ke provinsi dan ke pusat atau sebaliknya terkait dengan dukungan atas terselenggaranya keterbukaan informasi publik mengenai transparansi pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keeterbukaan Informasi Publik, dan juga pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bagian ketiga, pasal 4 ayat 1 berbunyi “ Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”. Untuk transparansi anggaran pada DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara sudah baik. Melalui informasi dari salah satu pegawai di bagian umum dan kepegawaian bahwa sub bagian perencanaan, keuangan, dan pelaporan selalu memberikan informasi mengenai keuangan apabila ada perubahan dan juga informasi keuangan lainnya. Dan untuk pihak luar juga DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara akan memberikan informasi keuangan dan pelaporan. Karena untuk pengguna informasi keuangan bukan hanya dilihat dari intern instansi maupun juga dari pihak luar termasuk masyarakat.
3. **Perspektif Pelanggan.** Pada perspektif ini untuk pelayanan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah baik, dalam

pelayanan kepada tamu yang datang juga sangat baik dan ramah. Dan juga untuk pendukung pelayanan yang baik DKIPSD memiliki 3 tempat duduk untuk tamu seperti pada lobby DKIPSD, ruang bidang infokom, dan juga di TUP sehingga para tamu yang datang tidak perlu berdiri menunggu untuk bertemu dengan kepala dinas DKIPSD. Berikut juga pelayanan dari kepala dinas juga baik karena apabila ibu kepala dinas ada di kantor pasti setiap tamu yang datang dilayani dengan baik dan ramah.

4. *Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan.* Pada perspektif ini dimana DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara harus meningkatkan kualitas kinerja dari pegawai. Karena untuk temuan di lokasi instansi, masih ada beberapa pegawai yang belum melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan tupoksi masing-masing, dan ini juga harus menjadi suatu kebiasaan yang harus diperbaiki lagi. Untuk jumlah pegawai sendiri harus ditambah lagi karena mengingat tidak lama lagi pembuatan ruangan untuk command center akan selesai, jadi akan diperlukan lebih banyak tenaga kerja. Dan untuk pembelajaran, pegawai DKIPSD mulai dari pegawai tetap dan honorer juga sering mengikuti berbagai jenis kegiatan pembelajaran seperti bimtek sertifikasi digital, bimtek jaringan computer dan kegiatan lainnya.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1. Kesimpulan**

Yang menjadi kesimpulan untuk penilaian kinerja pada DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara bahwa untuk kinerja yang telah dicapai DKIPSD sudah cukup baik, walaupun pada beberapa aspek yang dinilai masih kurang khususnya dalam penyerapan anggaran atau realisasi anggaran, kinerja pegawai honorer yang masih kurang melaksanakan tugas atau pekerjaannya di instansi.

### **5.2. Saran**

Saran untuk DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara agar lebih ditingkatkan lagi kinerja pegawai baik itu pegawai tetap maupun honorer, baik dalam pekerjaan, kedisiplinan, dan tanggung jawab pekerjaan. Dan agar penyerapan anggaran harus lebih efektif lagi, sehingga kinerja DKIPSD Provinsi Sulawesi Utara akan dinilai sangat baik. Untuk kepada setiap atasan dari masing-masing bidang atau sub bagian maupun kepala dinas, agar kiranya diadakan evaluasi mengenai perkembangan dari setiap program kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan sehingga dapat menilai kekurangan atau kelemahan apa saja yang masih harus diperbaiki.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit CV Andi Offset. Yogyakarta.
- Christine, Wildilestari, 2011. Konsep Balance Scorecard Dan Kendala Penerapannya. Jurnal STIE Semarang. Vol. 3, No.2
- Robert, S Kaplan dan David, P Norton. 2000. *Balance Scorecard: Menetapkan Strategi Menjadi Aksi.* Jakarta. Erlangga
- Mulyadi. 2001. *Balance Scorecard Alat Manajemen Kontenporer untuk Pelipatganda Kinerja Keuangan Perusahaan.* Jakarta : Salemba Empat.
- Ciptani, M. K. 2000. Balance Scorecard sebagai Pengukuran Kinerja Masa Depan : Suatu pengantar. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol.6 No.6, 16-31*
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

---

Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.